

# Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962)

Wanda Marshanda<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang, [washandaa23@students.unnes.ac.id](mailto:washandaa23@students.unnes.ac.id)

**Abstrak:** Pembebasan Irian Barat adalah rangkaian peristiwa sejarah yang mencakup upaya diplomatik, politik, dan militer Indonesia untuk mendapatkan kendali penuh atas wilayah yang sebelumnya berada di bawah administrasi Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi, konfrontasi militer dan peran perjanjian New York serta Pepera yang dilakukan oleh Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah Selama periode Demokrasi Liberal sejumlah kabinet yang berkuasa di Indonesia terlibat dalam upaya diplomasi untuk mencapai tujuan pembebasan Irian Barat. Selain itu terdapat pula konfrontasi militer yang disebut dengan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang mulai digaungkan pada tahun 1961. Meskipun sengketa tersebut melibatkan konfrontasi militer, pemerintah Indonesia juga menjalankan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghasilkan perjanjian New York pada 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Hasil Pepera menunjukkan mayoritas penduduk Irian Barat mendukung bergabung dengan Indonesia. Secara simbolis, pemberian kedaulatan penuh Irian Barat kepada Indonesia terjadi pada tahun 1963 melalui pembentukan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Namun, langkah signifikan berikutnya menuju konsensus internasional terjadi pada tahun 1969, ketika PBB secara resmi mengakui hasil Pepera yang menegaskan bahwa Irian Barat akan tetap menjadi bagian integral dari Indonesia.

**Kata kunci:** Diplomasi, Irian Barat, Konflik, Kemerdekaan

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.134>

\*Correspondensi: Wanda Marshanda

Email: [washandaa23@students.unnes.ac.id](mailto:washandaa23@students.unnes.ac.id)

Received: 17-02-2024

Accepted: 22-03-2024

Published: 25-04-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Abstract:* The liberation of West Irian is a series of historical events that include Indonesia's diplomatic, political and military efforts to gain full control of the territory that was previously under Dutch administration. This article aims to find out the diplomacy strategy, military confrontation and the role of the New York Agreement and the Act of Free Choice carried out by Indonesia in the liberation of West Irian. The research method used in this article is the historical research method, which consists of topic selection, heuristics or source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are During the Liberal Democracy period a number of cabinets in power in Indonesia were involved in diplomatic efforts to achieve the goal of liberating West Irian. There was also a military confrontation called Trikora (Tri Komando Rakyat) which began in 1961. Although the dispute involved military confrontation, the Indonesian government also conducted diplomacy through the United Nations (UN), resulting in the New York Agreement in 1962 and the Act of Free Choice (Act of Free Choice) in 1969. The results of the Act showed that the majority of the population of West Irian supported joining Indonesia. The symbolic granting of full sovereignty of West Irian to Indonesia took place in 1963 through the establishment of the United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). However, the next significant step towards international consensus occurred in 1969, when the UN formally recognized the results of the Act confirming that West Irian would remain an integral part of Indonesia.

**Keywords:** Diplomacy, West Irian, Conflict, Independence

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau, memiliki beragam suku bangsa dan bahasa. Namun, keragaman inilah yang menjadi dasar negara, yaitu konsep Bhineka Tunggal Ika. Sejak tanggal 1945, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan keluar dari masa penjajahan, berharap agar kesejahteraan merata dapat diperjuangkan mulai dari Aceh hingga Papua (Sucipto, 2018). Perlu dicatat bahwa Irian Barat berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menandai pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Irian Barat, sebaliknya, masih berada di bawah kekuasaan Belanda selama 18 tahun setelahnya, bahkan mencoba memisahkan diri dari NKRI. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung dari 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 meninggalkan sebuah isu yang berkaitan dengan status Irian Barat (Huber, 2018; Legg, 2020; Mal'ko, 2021; Vetrova, 2019). Delegasi Belanda menginginkan agar Irian Barat diberikan status khusus, karena mereka merasa bahwa wilayah ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan bagian lain Indonesia (Ismail, 1971). Di sisi lain, Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yang secara sah termasuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Selama ini, wilayah tersebut telah memiliki hubungan etnologis, ekonomi, dan agama yang kuat dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk mencegah kegagalan Konferensi Meja Bundar (KMB), kedua pihak sepakat bahwa isu Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan antara Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu satu tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan, yaitu pada 27 Desember 1949. Ketika Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) (Lapshin, 2020; O. Lavrova, 2019; O. Y. Lavrova, 2020; Tsymbaliuk, 2021), dalam pidatonya pada penutupan KMB tanggal 2 November 1949, ia menyatakan bahwa "kami merasa agak terpukul karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam KMB ini. Irian Barat, atau yang dikenal juga sebagai Nieuw Guinea, masih menjadi sumber perselisihan, dan kami akan berusaha menyelesaikannya dalam waktu satu tahun setelah kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)."

Diakuinya kedaulatan Indonesia melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, ternyata ini tidak secara otomatis mengakhiri masalah antara Belanda dan Indonesia. Sebagai hasil dari persetujuan tersebut, dinyatakan bahwa status Irian Barat akan diputuskan paling tidak satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) (Kusumaningrum, 2019). Namun, setahun kemudian, Belanda tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan isu Irian Barat kepada pihak Indonesia. Kurangnya tanggapan positif dari Belanda terhadap penyelesaian masalah Irian Barat yang masih terjajah, Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mengajukan isu Irian Barat ini kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan tersebut tidak segera mendapatkan dukungan yang signifikan dari negara-negara yang merupakan anggota PBB. Masalah Irian Barat gagal diakui sebagai resolusi PBB karena kurangnya dukungan yang memadai. Kegagalan ini secara signifikan dipengaruhi oleh komposisi

anggota PBB yang lebih menguntungkan Belanda. Pada saat itu, mayoritas anggota PBB masih didominasi oleh negara-negara Barat, sementara banyak negara berkembang masih berada di bawah penjajahan negara-negara Barat dan belum mencapai kemerdekaan (Husein, 2022). Ambisi kolonialisme membuat Belanda melanggar norma-norma hukum internasional, sehingga Indonesia tidak berhasil menyelesaikan konflik Irian Barat. Sebabnya, Belanda selalu menolak untuk membahas status wilayah Irian Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini, ialah: (1) untuk mengetahui strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. (2) Untuk mengetahui peran Tri Komando Rakyat dalam pembebasan Irian Barat, (3) untuk mengetahui peran Perjanjian New York dalam pembebasan Irian Barat.

## Metode

Tulisan ini merujuk pada penelitian studi literatur dengan langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya. Menurut (Kuntowijoyo, 2005) langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu: (1) Pemilihan topik, yaitu suatu tahapan untuk menentukan objek apa yang akan dibahas. Dalam menentukan topik yang akan dikaji, peneliti harus memenuhi dua syarat, yaitu kriteria dan kedekatan peneliti. (2) Heuristik, yaitu pencarian serta pengumpulan data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku penelitian dan artikel jurnal. (3) Kritik sumber, dilakukan untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kritik sumber terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber. Verifikasi atau kritik sumber sejarah bertujuan untuk memperoleh kredibilitas dari dokumen tersebut. (4) Interpretasi, pada tahap ini, peneliti harus menganalisis sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan dikritik pada tahap sebelumnya. Analisis tersebut meliputi sintesis dan interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut. Kuntowijoyo menekankan bahwa interpretasi harus dilakukan secara kritis dan reflektif, serta harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat peristiwa sejarah terjadi. Selain itu, interpretasi juga harus mempertimbangkan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. (5) Historiografi, merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah, di mana peneliti menyusun penafsiran fakta dan menghubungkannya menjadi sebuah cerita sejarah. Tahap historiografi dianggap sebagai tahap paling berat dalam penelitian sejarah karena proses penulisannya harus berdasarkan fakta yang terjadi. Dalam penulisan historiografi, peneliti harus mampu menyajikan hasil penelitiannya secara sistematis dan logis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap peristiwa sejarah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Strategi Diplomasi Dalam Pembebasan Irian Barat

Piagam pengakuan kedaulatan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanpa syarat dan secara mutlak serta mengakui Indonesia Serikat tersebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat" (Sucipto, 2018).

Pada tanggal 27 Desember 1949 Konferensi Meja Bundar di Den Haag menghasilkan pernyataan sebagai berikut, Belanda menyerahkan kendali atas wilayah tersebut kepada Republik Indonesia, namun status Irian Barat baru akan ditentukan setahun kemudian. Belanda berusaha untuk membangun kembali otoritas kolonial di Irian Barat dengan memanfaatkan penundaan tersebut. Setelah itu, Indonesia bergerak secara diplomatis. Perjalanan dari satu kabinet ke kabinet yang lain sangat panjang.

#### 1. Kabinet Natsir (1950)

Kabinet Natsir mengizinkan perundingan dimulai pada bulan Desember 1950, namun perundingan tersebut mengalami kebuntuan, yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperkuat perbatasannya dengan Hindia Belanda. Meskipun Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Belanda tetap berperilaku agresif sebagai negara agresor terhadap Indonesia. Dengan modifikasi pada konstitusinya, Irian Barat secara resmi digabungkan ke dalam Kerajaan Belanda pada pertengahan tahun 1952, berkat persetujuan sepihak dari Parlemen Belanda. Hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan anak-anak Indonesia yang lahir di Papua Nugini, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Republik Indonesia, dan tanpa diskusi.

#### 2. Kabinet Ali (1954)

Langkah-langkah Kabinet Ali merupakan kelanjutan dari inisiatif diplomatik sebelumnya untuk membawa masalah Irian Barat - yang oleh Belanda dianggap sebagai masalah internal - menjadi perhatian masyarakat internasional. Masalah ini pertama kali diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1954, tetapi upaya tersebut gagal karena tidak memiliki 2/3 mayoritas yang diperlukan.

#### 3. Kabinet Burhannudin Harahap (1955-1956)

Indonesia mulai bernegosiasi melalui Sidang Umum PBB ke-10 ketika pemerintahan Burhannudin Harahap mulai menjabat pada tahun 1955, namun hasilnya tidak memuaskan. Sidang Umum PBB mengatur agar pembicaraan dilakukan di Jenewa antara Belanda dan Indonesia antara tanggal 10 Desember 1955 dan 11 Desember 1956. "Pembicaraan mengenai beberapa masalah yang berhubungan dengan Irian Barat dengan pengertian bahwa kedaulatan masing-masing pihak tetap dipertahankan," demikian syarat yang diajukan oleh Belanda. Pihak Indonesia menganggap persyaratan ini ambigu dan menyesatkan, menunjukkan bahwa Belanda bermaksud untuk mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Delegasi dan rakyat Indonesia kecewa ketika perundingan terhenti. Pukulan pertama yang diberikan kepada Belanda datang ketika Indonesia

terpaksa mengambil langkah luar biasa dengan mengakhiri secara sepihak status Unie dengan Belanda pada tanggal 15 Februari 1956.

#### 4. Kabinet Ali II (1956)

Kabinet Ali II melanjutkan tindakan yang dilakukan oleh Kabinet Burhannudin Harahap. Seluruh kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dibubarkan oleh Indonesia pada tanggal 13 Mei 1956 (Eraña, 2019; O. Y. Lavrova, 2020; Legg, 2020b). Perjanjian-perjanjian tersebut termasuk perjanjian inti, Piagam Penyerahan Kedaulatan, Unie-status, Perjanjian Finec, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang didaftarkan ke sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan nomor registrasi 894. Dunia tercengang pada saat itu dengan langkah Indonesia yang mengembalikan kedaulatannya bukan berdasarkan perjanjian KMB, melainkan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanah dari Sabang sampai Merauke tercakup dalam kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan Proklamasi Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, dasar-dasar perjuangan Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat berubah secara signifikan.

### B. Trikora Dalam Pembebasan Irian Barat

Hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat tidak memuaskan dan bahkan menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Indonesia. Tuntutan-tuntutan pun bermunculan untuk mengakhiri inisiatif diplomatik dan politik. Belanda bahkan berusaha untuk mendirikan sebuah negara di Papua Newguini, meskipun sebenarnya ini adalah upaya pemerintah Belanda untuk mempertahankan kontrol atas Hindia Barat (Djamhari, 1995). Pemerintah akhirnya menggunakan kekuatan militer atau konfrontasi untuk menaklukkan Irian Barat sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat Indonesia. Di Yogyakarta, Presiden Soekarno memberikan pidato yang mendorong semua orang untuk bersatu dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Irian Barat, yang telah menjadi titik perselisihan antara Indonesia dan Belanda (M, 1979). Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat, atau Trikora, sebagai Panglima Tertinggi ABRI di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Soekarno menyampaikan isi Trikora dalam upacara pelantikan lulusan Akademi Militer Nasional di Alun-alun Keraton Yogyakarta. Isi dari Trikora tersebut antara lain: (1) menggagalkan pembentukan "Negara Boneka Papua" buatan Belanda Kolonial, (2) mengibarkan Merah Putih di Irian Barat sebagai bagian dari Tanah Air Indonesia, dan (3) bersiap untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Berdasarkan potensi alat utama sistem persenjataan (alutsista) masing-masing, Indonesia tertinggal jauh di belakang Belanda. Indonesia melakukan intervensi untuk menutup kesenjangan ini dengan memperkuat kekuatan militer di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara-tiga matra angkatan darat-dengan mengakuisisi perangkat keras pertahanan dari Uni Soviet (Bupu, 2021). Meskipun demikian, ada gencatan senjata yang diberlakukan sebelum serangan operasi itu. Partisipasi kapal selam

dalam korps Hiu Kencana, yang melakukan operasi infiltrasi dan berhasil mendaratkan pasukan, merupakan bukti dari gencatan senjata tersebut. Perjuangan melawan Belanda berada di bawah kendali korps Hiu Kencana. Karena pencapaian ini, Belanda lebih cenderung untuk menegosiasikan gencatan senjata, mengembalikan Irian Barat ke Indonesia, dan membangun perdamaian (Suryo, 2023). Kapal selam secara bersamaan dapat menginspirasi pasukan Indonesia dan memiliki efek psikologis yang kuat pada musuh. Oleh karena itu, kapal selam tidak diragukan lagi sangat penting bagi tujuan strategis Angkatan Laut Indonesia dalam merebut Irian Barat.

Di Laut Aru, yang berdekatan dengan perairan Hindia Barat, kapal-kapal perang Indonesia terlibat pertempuran dengan kapal perang dan pesawat Angkatan Laut Belanda ketika sedang melaksanakan tugas patroli. Turut serta dalam patroli tersebut beberapa pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut, antara lain Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Yos Soedarso, Kepala Direktorat Operasi MBAL Kolonel Soedomo, Asisten II Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Moersid, dan beberapa perwira staf lainnya. Untuk mengatur kegiatan selanjutnya, mereka bermaksud untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh terhadap kondisi di perairan di depan dekat perbatasan Trikora (Sucipto, 2018). Pada malam hari tanggal 15 Januari 1962, dua pesawat terlihat terbang di ketinggian 3000 kaki di atas permukaan laut melintasi formasi patroli ALRI. Diyakini bahwa model pesawat Neptunus dan Firefly dibuat di Belanda. Kapal penjelajah Indonesia, bersama dengan Komodor Yos Soedarso, Kapten Wiratno, dan sebagian awaknya, dibakar dan ditenggelamkan oleh dua kapal perusak Angkatan Laut Belanda. Pada tanggal 15 Januari 1962, pertempuran ini terjadi. Hasilnya adalah tenggelamnya KRI Macan Tutul dan gugurnya Komodor Yos Soedarso, yang terkenal dengan ucapan perpisahannya, "Kobarkan Semangat Juang!"

Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan sukarelawan Indonesia pada bulan April, Mei, dan Juni 1962 setelah pendaratan sukarelawan di benua Hindia Barat. Sukarelawan Indonesia secara bertahap mengambil alih kendali atas daratan Hindia Barat, pertama-tama merebut Teminabuan pada tanggal 21 Mei 1962, dan kemudian Sausapur pada tanggal 30 Mei 1962. Upaya konflik militer Indonesia menimbulkan kecemasan di Den Haag dan di kalangan Belanda terkait Irian Barat. Akibatnya, pemerintah Belanda mengajukan protes terhadap Indonesia, dengan tuduhan bahwa Indonesia terlibat dalam tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dunia, melalui kementeriannya dan perwakilannya di PBB.

### **C. Perjanjian New York Dalam Pembebasan Irian Barat**

Kolonialisme Belanda berada di bawah ancaman pada saat itu, dan diplomat Amerika Serikat yang terkemuka, Eksworth Bunker, mengusulkan agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. Rencana Bunker berisi beberapa elemen mendasar dari solusi yang pada dasarnya melibatkan pemberian kontrol atas Hindia Barat dari Belanda kepada Indonesia, melalui administrator transisi pihak ketiga. Gagasan Bunker jelas, ringkas, dan berfokus pada penguatan hubungan antara Indonesia dan Belanda dengan menyoroti

pentingnya memberikan kendali administratif atas Irian Barat kepada Indonesia (Susetyo, 2022).

Pada 26 Mei 1962, Bunker menerbitkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara Belanda dan Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut antara lain:

1. Perjanjian terpisah akan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda dan diserahkan kepada kantor Sekretaris Jenderal PBB di New York.
2. Pemerintah Belanda setuju untuk mengalihkan kewenangan pemerintah Afrika Barat kepada badan Eksekutif sementara di bawah pengawasan Wakil Sekretaris Jenderal PBB. Seorang kepala pemerintahan akan ditunjuk yang tidak memihak dan menjabat selama dua tahun.
3. Dengan menggunakan staf non-partai untuk tahun pertama, Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang mengawasi Badan Eksekutif sementara akan mengelola pemerintahan Irian Barat.

Hasilnya, Indonesia secara umum menerima, tetapi tidak berarti mengadopsi setiap pasal yang diusulkan Bunker. Hal ini dikarenakan penolakan Indonesia untuk mengakui penyerahan Irian Barat secara keseluruhan hingga dua tahun berlalu. Belanda memberikan wewenang kepada PBB atas Irian Barat sesuai dengan ketentuan Perjanjian New York. Dengan demikian, Otoritas Eksekutif Sementara (UNTEA) PBB dibentuk (Rindawa, 2021). Setelah transisi kekuasaan secara damai dari Belanda ke UNTEA, serah terima kekuasaan secara resmi dari Pemerintah Belanda ke UNTEA selesai pada 1 Oktober 1962.

Menanggapi tuntutan dan permintaan rakyat Irian Barat, Sekretaris Jenderal PBB berkunjung ke Jakarta dan Jayapura pada bulan Februari 1963 untuk menegaskan kembali bahwa PBB akan memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil alih kekuasaan dari UNTEA dengan lancar. Pada tanggal 10 Februari 1963, Pemerintah Indonesia mengambil alih kekuasaan dari UNTEA untuk meneruskan aspirasi penduduk Irian Barat. Sejumlah delegasi Irian Barat menandatangani Piagam Kota Baru pada tanggal 1 Desember 1963, dengan demikian mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan untuk wilayah Irian Barat dan rakyat Indonesia (Sucipto, 2018). Selain itu, para wakil rakyat Irian Barat berjanji dalam Piagam tersebut untuk menegakkan keamanan dan ketertiban Irian Barat serta ikut serta dalam pembangunan wilayah tersebut di bawah arahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga bersumpah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai sumpah yang diikrarkan oleh rakyat Irian Barat.

### **Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)**

Pemerintah Indonesia diwajibkan oleh Perjanjian New York untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia sendiri yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan para pejabat Pepera hanya berperan sebagai penasihat dan pembantu (Suropati, 2019). Perjanjian New York menyatakan bahwa pelaksanaan hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri

sesuai dengan norma-norma internasional, namun kondisi di Irian Barat menyulitkan pelaksanaan klausul ini. Oleh karena itu, dengan menggunakan mandat PBB dan kekuasaan yang diberikan kepada Indonesia melalui Perjanjian New York, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil sikap demokratis dan mengadakan diskusi atau konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Barat. Tujuan dari diskusi tersebut adalah untuk menentukan tindakan mana yang paling sesuai dengan situasi di Irian Barat (Chandra, 2022). Indonesia bertanggung jawab untuk memberlakukan Pepera, dan teknik serta proses berikut ini digunakan untuk melakukannya:

1. Sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilaksanakan melalui proses yang demokratis atau musyawarah.
2. Setiap kabupaten di provinsi Irian Barat menjadi tempat pelaksanaan Pepera.
3. Dewan Musyawarah Pepera yang terdiri dari wakil-wakil dari setiap kabupaten ini dibentuk untuk merencanakan Pepera di masing-masing kabupaten.
4. Keanggotaan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) didasarkan pada jumlah penduduk di masing-masing kabupaten.
5. Usulan awal untuk jumlah utusan menyatakan bahwa akan ada satu wakil untuk setiap 750 penduduk. Namun, peraturan yang direvisi menyatakan bahwa Dewan Musyawarah Pepera di setiap kabupaten harus memiliki minimal 75 anggota dan maksimal 175 anggota karena jumlah penduduk yang kecil di Kabupaten Fak-Fak (40.000 jiwa) dan Kabupaten Jayawijaya (165.000 jiwa).

Indonesia diwajibkan untuk melakukan konsultasi publik di Irian Barat pada akhir tahun 1969 sebagai bagian dari Perjanjian New York. Tindakan ini diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam tiga bagian, dimulai pada awal tahun 1969. Ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, dengan diskusi mengenai prosedur pelaksanaan Pepera dengan DPRD Jayapura.
2. Dewan Musyawarah Pepera dipilih pada tahap kedua, yang berlangsung hingga Juni 1969.
3. Pelaksanaan Pepera di Kabupaten Merauke dilakukan pada tahap ketiga, yang berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969.

Perwakilan dari Belanda, Australia, dan PBB mengamati pelaksanaan Pepera. Hasil Pepera tampaknya menunjukkan bahwa warga Irian Barat ingin menjadi bagian dari Republik Indonesia. Setelah hasil Pepera diserahkan kepada Majelis Umum PBB, Majelis Umum PBB menyetujui hasil Pepera pada tanggal 19 November 1969 (Sucipto, 2018).

## Simpulan

Sengketa Irian Barat (Papua) bermula setelah kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1945. Pada saat itu, Irian Barat tetap berada di bawah kendali Belanda, dan belum disertakan dalam perjanjian kemerdekaan Indonesia.

Sengketa terkait kedaulatan Irian Barat pun menjadi salah satu isu utama dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Proses pembebasan Irian Barat merujuk pada serangkaian peristiwa yang melibatkan usaha-usaha diplomasi, politik, dan militer yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut. Irian Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan kini disebut Papua, merupakan bagian yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Proses pembebasan Irian Barat mencakup beberapa tahap, termasuk diplomasi internasional, konfrontasi militer, dan perundingan internasional. Salah satu tonggak penting dalam pembebasan Irian Barat adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969. Hasil Pepera menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Irian Barat mendukung bergabung dengan Indonesia. Pada tingkat simbolis, penyerahan kedaulatan penuh Irian Barat kepada Indonesia terjadi pada tahun 1963 dengan pembentukan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Namun, peristiwa selanjutnya yang mencapai konsensus internasional terjadi pada tahun 1969, saat PBB secara resmi menerima hasil Pepera yang menetapkan bahwa Irian Barat akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Bupu, S. (2021). Operasi Trikora sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 1(11).
- Chandra, F. (2022). Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 62–77.
- Djamhari, S. (1995). *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat (Trikora)*. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi Abri.
- Eraña, H. (2019). The Prion 2018 round tables (II): A $\beta$ , tau,  $\alpha$ -synuclein... are they prions, prion-like proteins, or what? *Prion*, 13(1), 41–45. <https://doi.org/10.1080/19336896.2019.1569451>
- Huber, I. (2018). 1st German phage symposium—conference report. *Viruses*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/v10040158>
- Husein, H. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya Kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI*.
- Ismail, A. (1971). Irian Barat dari masa ke masa. *Sedjarah Militer KODAM XVII/Tjenderawasih*.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.

- Kusumaningrum, A. (2019). Masa Demokrasi terpimpin. PT. Maraga Borneo Tarigas.
- Lapshin, V. F. (2020). The use of artificial intelligence in criminal law and criminal procedure systems. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1001(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1001/1/012144>
- Lavrova, O. (2019). Overview of the 17th all-Russia open conference with international participation "current problems in remote sensing of the earth from space." *Sovremennye Problemy Distantcionnogo Zondirovaniya Zemli Iz Kosmosa*, 16(6), 305–310. <https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-6-305-310>
- Lavrova, O. Y. (2020). Results and highlights of the 18th All-Russia Open Conference with International Participation "Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space." *Sovremennye Problemy Distantcionnogo Zondirovaniya Zemli Iz Kosmosa*, 17(7), 292–296. <https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-7-292-296>
- Legg, S. (2020). "Political Atmospherics": The India Round Table Conference's Atmospheric Environments, Bodies and Representations, London 1930–1932. *Annals of the American Association of Geographers*, 110(3), 774–792. <https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1630247>
- Legg, S. (2020). Imperial internationalism: The round table conference and the making of India in london, 1930–1932. *Humanity*, 11(1), 32–53. <https://doi.org/10.1353/hum.2020.0006>
- Legg, S. (2020). Political lives at sea: working and socialising to and from the India Round Table Conference in London, 1930–1932. *Journal of Historical Geography*, 68, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.jhg.2019.12.005>
- M, C. (1979). Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat. Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Mal'ko, A. V. (2021). Legal culture, legal policy and human rights (Review materials of scientific-practical conference). *Gosudarstvo i Pravo*, 2021(2), 145–159. <https://doi.org/10.31857/S102694520013680-9>
- Rindawa, H. (2021). Peran Kodam XIV/Hasanuddin Dalam Pembebasan Irian Barat. Unniversitas Hasanudin.
- Sucipto, S. (2018). Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Derwati Press.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1).

- 
- Suryo, F. (2023). Irian Barat di Mata Sultan Zainal Abidin Syah: Dari Konferensi Malino Hingga Operasi Trikora. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1).
- Susetyo, B. (2022). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Irian Barat Tahun 1949-1962. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1).
- Tsymbaliuk, S. (2021). Green human resource management: How to implement environmental issues into HR practices. *E3S Web of Conferences*, 255. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501037>
- Vetrova, E. A. (2019). Management of educational services promotion in the field of higher education (the example of "Russian State Social University"). *European Journal of Contemporary Education*, 8(2), 370–377. <https://doi.org/10.13187/ejced.2019.2.370>